



**PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**



**RANCANGAN AKHIR RENJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Tanjungpinang, 12 JULI 2023
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang


Zulhidayat
ZULHIDAYAT, S. Hut
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 19781106 200502 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Renja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
17. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
18. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah
- 3) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
- 4) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 5) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Sekretariat Daerah dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun Anggaran 2024.

D. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi adalah untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Tidak ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.472.794.581 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.072.581.021 atau terserap sebesar 97,94%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN yaitu untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 233.267.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.229.675 atau terserap sebesar 97,41%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah

terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.358.710.986 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.157.630.427 atau terserap sebesar 91,47%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 237.143.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.940.935 atau terserap sebesar 97,81%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi , serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp. 850.339.920 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 806.408.434 atau terserap sebesar 94,83%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah tersedianya kebutuhan bahan/material untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan

- instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan bahan/material untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.199.948.625 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.190.027.685 atau terserap sebesar 99,17%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan fasilitas kunjungan tamu untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.544.973.002 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.834.853.895 atau terserap sebesar 72,10%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan penyediaan kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.160.852.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.078.404.000 atau terserap sebesar 92,90%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan

ketersediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.626.445.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.558.004.761 atau terserap sebesar 95,79%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan ketersediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 549.640.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 497.646.912 atau terserap sebesar 90,54%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah tersedianya aset tetap lainnya untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan ketersediaan aset tetap lainnya untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 302.400.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 297.721.761 atau terserap sebesar 98,45%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.566.597.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.392.612.320 atau terserap sebesar 93,22%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pembayaran tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.096.218.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.022.496.112 atau terserap sebesar 98,20%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah terbayarnya jasa pelayanan umum kantor untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pembayaran jasa pelayanan umum kantor untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 610.350.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 569.159.108 atau terserap sebesar 93,25%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.062.390.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.030.861.208 atau terserap sebesar 97,03%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 136.038.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.564.040 atau terserap sebesar 94,51%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebel untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebel untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.324.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.607.765 atau terserap sebesar 97,63%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk jangka

waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 266.525.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 257.338.900 atau terserap sebesar 96,55%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan aset tetap lainnya untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.588.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.999.650 atau terserap sebesar 86,79%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144.364.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.195.230 atau terserap sebesar 86,72%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya untuk

jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 219.802.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.249.592 atau terserap sebesar 81,55%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 852.270.049 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 648.671.541 atau terserap sebesar 76,11%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 153.400.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.186.550 atau terserap sebesar 99,21%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.173.200 atau terserap sebesar 23,97%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 599.231.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 599.229.600 atau terserap sebesar 100,00%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan ketersediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 398.673.080 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 376.013.833 atau terserap sebesar 94,32%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan

rumah tangga kepala daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 293.016.140 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.783.057 atau terserap sebesar 94,12%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.480.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.364.856.662 atau terserap sebesar 95,35%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah untuk 12 bulan dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 12 bulan terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah untuk jangka waktu 12 bulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- Kegiatan Penataan Organisasi
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.430.360 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.201.461 atau terserap sebesar 67,71%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi.

- Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.165.560 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.126.300 atau terserap sebesar 87,81%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.769.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.728.123 atau terserap sebesar 89,18%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
 - Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 851.254.195 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 764.819.787 atau terserap sebesar 89,85%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi keprotokolan
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 354.661.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 353.649.435 atau terserap sebesar 99,71%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim

bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi komunikasi pimpinan

- ✓ Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.272.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.644.740 atau terserap sebesar 99,84%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pendokumentasian tugas pimpinan
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Kegiatan Administrasi Administrasi Tata Pemerintahan
 - ✓ Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.229.262.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.224.507.840 atau terserap sebesar 99,61%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen penataan administrasi pemerintahan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 195.274.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.933.150 atau terserap sebesar 99,83%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.715.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.058.690 atau terserap sebesar 98,42%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait,

serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah

- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.996.333.660 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.756.399.784 atau terserap sebesar 87,98%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.293.261.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.253.865.040 atau terserap sebesar 96,95%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.820.902.492 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.454.922.275 atau terserap sebesar 90,42%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.177.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.388.000 atau terserap sebesar 82,37%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor

- pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 277.685.625 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.663.069 atau terserap sebesar 87,75%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi bantuan hukum
 - ✓ Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.930.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.796.000 atau terserap sebesar 95,73%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 115.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.487.652 atau terserap sebesar 84,77%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
 - ✓ Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 97.113.920 atau terserap sebesar 80,93%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengendalian dan distribusi perekonomian

- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.720.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.958.264 atau terserap sebesar 94,60%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 145.331.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.247.267 atau terserap sebesar 75,17%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.030.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.987.426 atau terserap sebesar 96,90%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.472.275 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.288.871 atau terserap sebesar 87,50%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 448.082.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 439.245.091 atau terserap sebesar 98,03%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
 - ✓ Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 424.011.820 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.787.953 atau terserap sebesar 91,46%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik dimana target nilai yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 77,02 ternyata melebihi target yaitu 84,20.

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022				Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)	
				Satuan Indikator	RKPD		APBD		Satuan Indikator	RKPD Perubahan		APBD Perubahan		I		II		III					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		SEKRETARIAT DAERAH			86.920.804.358	50.525.780.079		58.653.208.975	57.365.145.270		4.233.204.266		13.609.605.916		12.772.927.778		23.342.216.458		53.957.954.418	100,00	94,06		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			86.920.804.358	50.525.780.079		58.653.208.975	57.365.145.270		4.233.204.266		13.609.605.916		12.772.927.778		23.342.216.458		53.957.954.418	100,00	94,06		
4 01		SEKRETARIAT DAERAH			86.920.804.358	50.525.780.079		58.653.208.975	57.365.145.270		4.233.204.266		13.609.605.916		12.772.927.778		23.342.216.458		53.957.954.418	100,00	94,06		
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			59.741.054.358	39.717.726.333		43.944.074.729	46.705.955.048		4.114.688.616		11.507.550.804		10.130.197.130		18.392.181.170		44.144.617.720	100,00	94,52		
401012,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.827.639.952	16.382.574.085		19.137.887.905	19.472.794.581		2.374.670.695		7.115.867.291		4.285.227.910		5.296.815.125		19.072.581.021				
401012,0201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	20.827.639.952	12	16.382.574.085	19.472.794.581	3	2.374.670.695	3	7.115.867.291	3	4.285.227.910	3	5.296.815.125	12	19.072.581.021	100,00	97,94		
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00	97,94	
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST	
401012,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.900.000.000	5.049.150.232		5.049.150.232	7.424.383.833		365.829.475		1.096.121.890		1.629.224.954		3.356.914.732		6.448.091.051				
401012,0601		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	400.000.000	12	195.370.000	233.267.500	3	-	3	46.018.500	3	62.798.805	3	118.412.370	12	227.229.675	100,00	97,41		
401012,0604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	bulan	12	1.700.000.000	12	1.694.169.312	2.358.710.986	3	205.447.000	3	635.983.855	3	238.100.255	3	1.078.099.317	12	2.157.630.427	100,00	91,47		
401012,0605		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	350.000.000	12	199.922.000	237.143.800	3	-	3	48.071.100	3	48.135.150	3	135.734.685	12	231.940.935	100,00	97,81		
401012,0607		Penyediaan Bahan/Material	tersedianya kebutuhan bahan/material	bulan	12	350.000.000	12	768.510.920	850.339.920	3	-	3	685.850	3	389.405.550	3	416.317.034	12	806.408.434	100,00	94,83		
401012,0608		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	1.500.000.000	12	1.000.000.000	1.199.948.625	3	160.382.475	3	79.760.725	3	578.447.155	3	371.437.330	12	1.190.027.685	100,00	99,17		
401012,0609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	2.600.000.000	12	1.191.178.000	2.544.973.002	3	-	3	285.601.860	3	312.338.039	3	1.236.913.996	12	1.834.853.895	100,00	72,10		
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00	86,85	
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	T	
401012,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.803.500.000	2.704.090.000		2.704.090.000	3.639.337.000		-		-		-		3.431.777.434		3.431.777.434				
401012,0702		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	bulan	12	2.835.000.000	12	1.200.000.000	1.160.852.000	3	-	3	-	3	-	3	1.078.404.000	12	1.078.404.000	100,00	92,90		
401012,0706		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	bulan	12	1.348.000.000	12	1.154.450.000	1.626.445.000	3	-	3	-	3	-	3	1.558.004.761	12	1.558.004.761	100,00	95,79		
401012,0707		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	tersedianya aset tetap lainnya	bulan	12	1.110.500.000	12	349.640.000	549.640.000	3	-	3	-	3	-	3	497.646.912	12	497.646.912	100,00	90,54		
401012,0711		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	12	510.000.000			302.400.000								297.721.761	12	297.721.761	100,00	98,45		
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00	94,30	
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST	

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

401012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.419.189.440		6.528.453.200			6.528.453.200		6.662.815.700		988.348.470		1.396.171.883		1.783.762.824		2.246.825.255		6.415.108.432		
401012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	3.100.000.000	12	2.433.637.000	bulan	12	2.433.637.000	12	2.566.597.000	3	326.231.520	3	425.297.317	3	804.970.207	3	836.113.276	12	2.392.612.320	100,00	93,22
401012,0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	4.319.189.440	12	4.094.816.200	bulan	12	4.094.816.200	12	4.096.218.700	3	662.116.950	3	970.874.566	3	978.792.617	3	1.410.711.979	12	4.022.496.112	100,00	98,20
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100,00	96,28		
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST		
401012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.680.000.000		3.134.315.000			3.134.315.000		2.952.381.000		98.010.000		175.068.800		541.730.880		1.974.165.813		2.788.975.493		
401012,0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	bulan	12	1.300.000.000	12	595.350.000	bulan	12	595.350.000	12	610.350.000	3	-	3	-	3	152.215.950	3	416.943.158	12	569.159.108	100,00	93,25
401012,0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dan perizinan kendaraan operasional dinas atau lapangan	bulan	12	1.300.000.000	12	1.253.990.000	bulan	12	1.253.990.000	12	1.062.390.000	3	-	3	-	3	318.487.140	3	712.374.068	12	1.030.861.208	100,00	97,03
401012,0905	Pemeliharaan Mebel	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebel	bulan	12	240.000.000	12	116.040.000	bulan	12	116.040.000	12	136.038.000	3	-	3	53.379.300	3	36.512.340	3	38.672.400	12	128.564.040	100,00	94,51
401012,0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	12	660.000.000	12	369.820.000	bulan	12	369.820.000	12	493.324.000	3	-	3	71.023.500	3	34.515.450	3	376.068.815	12	481.607.765	100,00	97,63
401012,0907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan aset tetap lainnya	bulan	12	455.000.000	12	249.545.000	bulan	12	249.545.000	12	266.525.000	3	98.010.000	3	31.801.000	3	-	3	127.527.900	12	257.338.900	100,00	96,55
401012,0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	400.000.000	12	170.520.000	bulan	12	170.520.000	12	19.588.000	3	-	3	-	3	-	3	16.999.650	12	16.999.650	100,00	86,79
401012,0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	275.000.000	12	179.256.000	bulan	12	179.256.000	12	144.364.000	3	-	3	18.865.000	3	-	3	106.330.230	12	125.195.230	100,00	86,72
401012,0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	1.050.000.000	12	199.794.000	bulan	12	199.794.000	12	219.802.000	3	-	3	-	3	-	3	179.249.592	12	179.249.592	100,00	81,55
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100,00	94,47		
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST		

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

401012,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4.055.724.966		1.711.165.136			3.182.199.712		1.684.901.049		175.093.376		405.701.784		536.845.553		301.620.178		1.419.260.891		
401012,1101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	2.915.724.966	12	878.534.136	bulan	12	2.349.568.712	12	852.270.049	3	25.285.976	3	255.894.384	3	234.851.603	3	132.639.578	12	648.671.541	100,00	76,11
401012,1102	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	300.000.000	12	153.400.000	bulan	12	153.400.000	12	153.400.000	3	-	3	-	3	152.186.550	3	-	12	152.186.550	100,00	99,21
401012,1103	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terpenuhinya pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	300.000.000	12	80.000.000	bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	3	-	3	-	3	-	3	19.173.200	12	19.173.200	100,00	23,97
401012,1104	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	540.000.000	12	599.231.000	bulan	12	599.231.000	12	599.231.000	3	149.807.400	3	149.807.400	3	149.807.400	3	149.807.400	12	599.229.600	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	84,23	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T	
401012,12	Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah				3.800.000.000		3.151.039.220			3.151.039.220		3.171.789.220		-		837.930.752		1.100.281.956		1.078.440.844		3.016.653.552		
401012,1201	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	bulan	12	850.000.000	12	398.673.080	bulan	12	398.673.080	12	398.673.080	3	-	3	94.286.930	3	96.867.586	3	184.859.317	12	376.013.833	100,00	94,32
401012,1202	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	terpenuhinya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	bulan	12	850.000.000	12	293.016.140	bulan	12	293.016.140	12	293.016.140	3	-	3	71.876.030	3	64.095.701	3	139.811.326	12	275.783.057	100,00	94,12
401012,1203	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	bulan	12	2.100.000.000	12	2.459.350.000	bulan	12	2.459.350.000	12	2.480.100.000	3	-	3	671.767.792	3	939.318.669	3	753.770.201	12	2.364.856.662	100,00	95,35
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	95,11	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
401012,13	Penataan Organisasi				900.000.000		336.365.220			336.365.220		336.365.220		112.736.600		70.325.740		65.883.483		30.110.061		279.055.884		
401012,1301	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen	Buah	1	300.000.000	1	87.430.360	Buah	1	87.430.360	1	87.430.360	0	8.161.600	0	7.598.000	0	19.987.000	1	23.454.861	1	59.201.461	100,00	67,71
401012,1302	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen	Buah	1	300.000.000	1	156.165.560	Buah	1	156.165.560	1	156.165.560	0	103.375.000	0	27.751.100	0	3.000.000	1	3.000.200	1	137.126.300	100,00	87,81
401012,1303	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen	Buah	1	300.000.000	1	92.769.300	Buah	1	92.769.300	1	92.769.300	0	1.200.000	0	34.976.640	0	42.896.483	1	3.655.000	1	82.728.123	100,00	89,18
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	82,96	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T	
401012,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				4.355.000.000		720.574.240			720.574.240		1.361.187.445		-		410.362.664		187.239.570		675.511.728		1.273.113.962		
401012,1401	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Dokumen	Buah	1	2.200.000.000	1	465.302.240	Buah	1	465.302.240	1	851.254.195	0	-	0	248.571.084	0	140.079.000	1	376.169.703	1	764.819.787	100,00	89,85
401012,1402	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen	Buah	1	1.420.000.000	1	100.000.000	Buah	1	100.000.000	1	354.661.250	0	-	0	69.292.410	0	-	1	284.357.025	1	353.649.435	100,00	99,71
401012,1403	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen	Buah	1	735.000.000	1	155.272.000	Buah	1	155.272.000	1	155.272.000	0	-	0	92.499.170	0	47.160.570	1	14.985.000	1	154.644.740	100,00	99,60
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	93,53	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				22.769.750.000	9.223.373.741			13.124.454.241		9.074.542.177		24.506.000		1.706.675.005	2.233.639.523		4.412.713.320	8.377.533.848	100,00	92,32
401022,01	Administrasi Tata Pemerintahan				5.245.000.000	1.493.919.500			5.245.000.000		1.592.251.500		-		441.048.765	335.362.500		808.088.415	1.584.499.680		
401022,0101	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Buah	1	3.775.000.000	1.110.342.000	Buah	1	3.775.000.000	1	1.229.262.000	0	-	0	358.867.540	250.590.700	1	615.049.600	1.224.507.840	100,00	99,61
401022,0102	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Buah	1	720.000.000	195.274.000	Buah	1	720.000.000	1	195.274.000	0	-	0	2.400.000	75.232.300	1	117.300.850	194.933.150	100,00	99,83
401022,0103	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	Buah	1	750.000.000	188.303.500	Buah	1	750.000.000	1	167.715.500	0	-	0	79.781.225	9.539.500	1	75.737.965	165.058.690	100,00	98,42
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	99,51
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST
401022,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				16.674.750.000	7.396.316.716			7.546.316.716		7.110.497.152		-		1.190.395.640	1.820.726.930		3.454.064.529	6.465.187.099		
401022,0201	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen	Buah	1	3.143.650.000	2.282.153.224	Buah	1	2.282.153.224	1	1.996.333.660	0	-	0	237.767.900	363.277.155	1	1.155.354.729	1.756.399.784	100,00	87,98
401022,0202	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen	Buah	1	5.931.100.000	1.293.261.000	Buah	1	1.293.261.000	1	1.293.261.000	0	-	0	-	813.975.740	439.889.300	1	1.253.865.040	100,00	96,95
401022,0203	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen	Buah	1	7.600.000.000	3.820.902.492	Buah	1	3.970.902.492	1	3.820.902.492	0	-	0	952.627.740	643.474.035	1	1.858.820.500	3.454.922.275	100,00	90,42
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	90,92
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST
401022,03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum				850.000.000	333.137.525			333.137.525		371.793.525		24.506.000		75.230.600	77.550.093		150.560.376	327.847.069		
401022,0301	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen	Buah	1	300.000.000	44.177.900	Buah	1	44.177.900	1	44.177.900	0	-	0	27.500.000	5.998.000	1	2.890.000	36.388.000	100,00	82,37
401022,0302	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen	Buah	1	450.000.000	239.029.625	Buah	1	239.029.625	1	277.685.625	0	24.506.000	0	21.660.600	62.061.593	1	135.434.876	243.663.069	100,00	87,75
401022,0303	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen	Buah	1	100.000.000	49.930.000	Buah	1	49.930.000	1	49.930.000	0	-	0	26.070.000	9.490.500	1	12.235.500	47.796.000	100,00	95,73
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	88,18
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	T
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.410.000.000	1.584.680.005			1.584.680.005		1.584.648.045		94.009.650		395.380.107	409.091.125		537.321.968	1.435.802.850	100,00	90,61
401032,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				335.000.000	235.000.000			235.000.000		235.000.000		3.321.200		19.319.257	64.225.043		107.736.072	194.601.572		
401032,0101	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen	Buah	1	160.000.000	115.000.000	Buah	1	115.000.000	1	115.000.000	0	-	0	9.393.490	20.255.807	1	67.838.355	97.487.652	100,00	84,77
401032,0102	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen	Buah	1	175.000.000	120.000.000	Buah	1	120.000.000	1	120.000.000	0	3.321.200	0	9.925.767	43.969.236	1	39.897.717	97.113.920	100,00	80,93
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	82,81
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	T
401032,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				1.200.000.000	313.081.710			313.081.710		313.081.250		60.781.650		-	70.940.039		138.471.268	270.192.957		
401032,0201	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen	Buah	1	350.000.000	69.720.000	Buah	1	69.720.000	1	69.720.000	0	34.458.000	0	-	24.091.171	7.409.093	1	65.958.264	100,00	94,60
401032,0202	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen	Buah	1	500.000.000	145.331.710	Buah	1	145.331.710	1	145.331.250	0	3.576.150	0	-	6.463.630	99.207.487	1	109.247.267	100,00	75,17
401032,0203	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	Buah	1	350.000.000	98.030.000	Buah	1	98.030.000	1	98.030.000	0	22.747.500	0	-	40.385.238	31.854.688	1	94.987.426	100,00	96,90
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	86,30
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	T

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

401032,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2.700.000.000		921.598.295			921.598.295		921.566.795		29.906.800		368.736.550		241.309.793		230.368.772		870.321.915			
401032,0301	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen	Buah	1	500.000.000	1	49.472.275	Buah	1	49.472.275	1	49.472.275	0	4.679.600		7.632.750	0	11.605.900	1	19.370.621	1	43.288.871	100,00	87,50	
401032,0302	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen	Buah	1	500.000.000	1	448.082.700	Buah	1	448.082.700	1	448.082.700	0	11.227.200		343.743.800	0	83.314.091	1	960.000	1	439.245.091	100,00	98,03	
401032,0303	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen	Buah	1	1.700.000.000	1	424.043.320	Buah	1	424.043.320	1	424.011.820	0	14.000.000		17.360.000	0	146.389.802	1	210.038.151	1	387.787.953	100,00	91,46	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	94,44		
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST		
401032,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				175.000.000		115.000.000			115.000.000		115.000.000		-		7.324.300		32.616.250		60.745.856		100.686.406			
401032,0401	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen	Buah	1	175.000.000	1	115.000.000	Buah	1	115.000.000	1	115.000.000	0	-	0	7.324.300	0	32.616.250	1	60.745.856	1	100.686.406	100,00	87,55	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	87,55		
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T		
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												57.365.145.270	JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										53.957.954.418		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100,00	94,06		
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						ST	ST		

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian; dan
- d. Sub Bagian

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

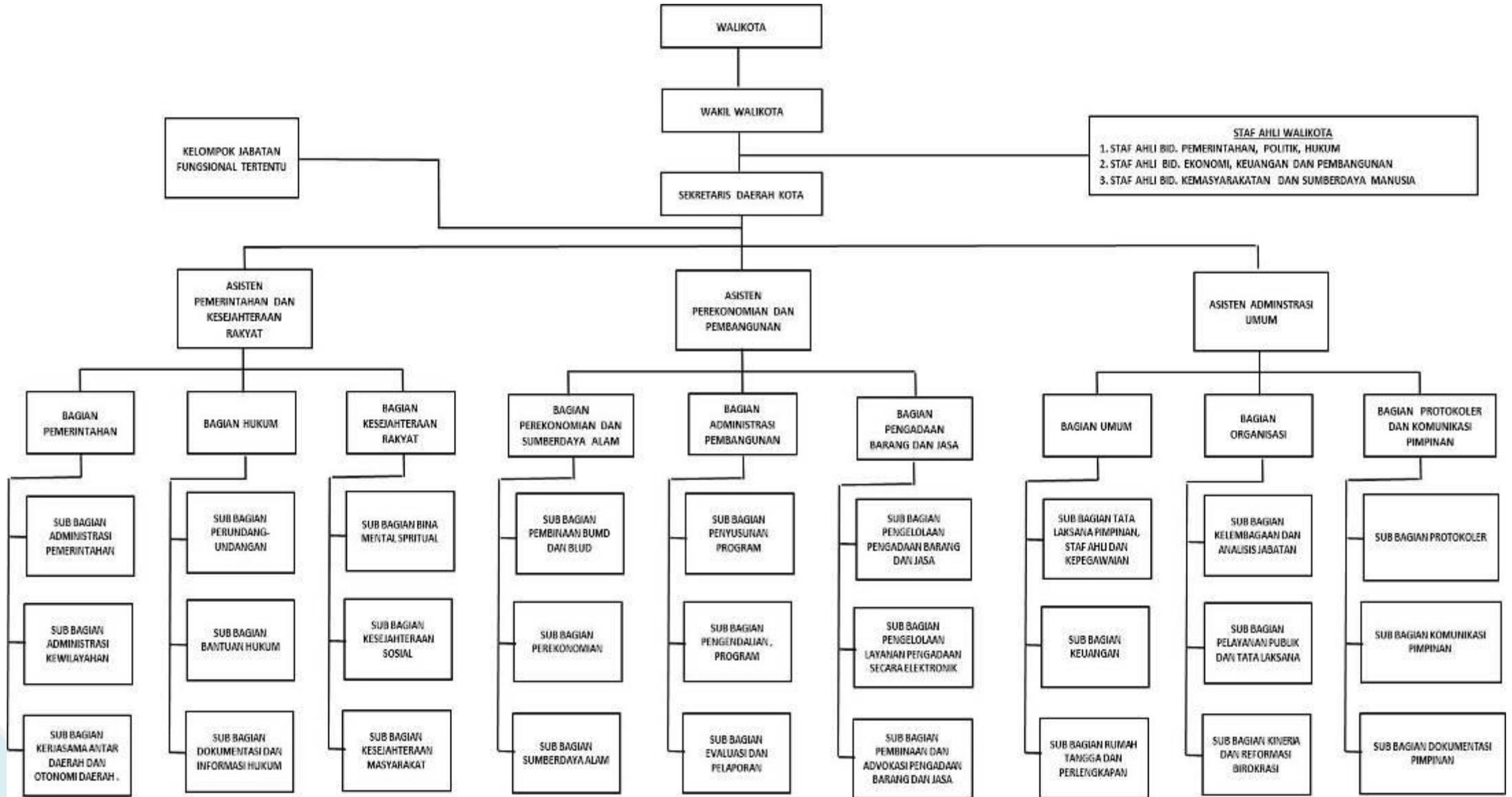
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (RENSTRA dan RENJA) Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- b. menyusun kebijakan pemerintah daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di lingkup Sekretariat Daerah;
- d. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah, badan daerah, lembaga teknis daerah lainnya, satuan polisi pamong praja dan penanggulangan kebakaran dan kecamatan agar sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;

- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah meliputi dinas daerah, badan daerah, lembaga teknis daerah lainnya, satuan polisi pamong praja dan penanggulangan kebakaran dan kecamatan;
- g. menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan daerah;
- j. melaksanakan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Informasi Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat Sekretariat Daerah dan tingkat kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- l. mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



No	Program	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	2021	2022			
						Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	Jumlah Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH dibagi jumlah usulan Perda dan Perkada x 100	%	80	80	100	125	ST
		Persentase produk hukum daerah yang terpublikasikan	Jumlah produk hukum yang terpubikasi dibagi jumlah produk hukum daerah x 100	%	57,14	75	100	133,33	ST
		Jumlah produk hukum daerah yang terpublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang terpublikasikan	Produk hukum	38	5	42	840	ST
		Persentase kasus hukum yang diselesaikan	Jumlah kasus hokum yang selesai dibagi jumlah kasus hokum yang ditangani x 100	%	80	90	100	111,11	ST
		Persentase proyek pembangunan yang didampingi TP4D	Jumlah proyek pembangunan yang didampingi TP4D dibagi jumlah proyek pembangunan yang direncanakan didampingi TP4D x 100	%	0	100	0	0	SR
		Nilai LPPD	Nilai LPPD	Skor	NA	3,50	NA	-	SR
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang harus disusun x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	Jumlah RT dan RW yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah RT dan RW x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase rekomendasi yang dihasilkan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dibagi jumlah rapat yang diselenggarakan x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase kecamatan dan kelurahan baru yang terbentuk	Jumlah kecamatan dan kelurahan baru yang terbentuk dibagi jumlah kecamatan dan kelurahan baru yang direncanakan x 100	%	0	100	0	0	SR
		Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	Jumlah kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan	Jumlah kerjasama daerah yang diimplementasikan dibagi jumlah kerjasama yang terjalin x 100	%	100	80	100	125	ST
		Persentase rakor Kecamatan dan Kelurahan yang terselenggara dengan baik	Jumlah rakor kecamatan dan kelurahan yang terselenggara dengan baik dibagi jumlah rakor kecamatan dan kelurahan yang terselenggara x 100	%	100	100	100	100	ST
Persentase penyelesaian tapal batas	Jumlah penyelesaian tapal batas dibagi jumlah kecamatan x 100	%	NA	75	100	133,33	ST		
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan barang/ jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang tepat waktu dibagi rencana pengadaan barang/jasa x 100	%	85	98	96,47	98,44	ST
		Persentase pengadaan barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	Jumlah pengadaan barang/jasa yang terlayani dengan baik melalui e-procurement dibagi rencana umum pengadaan x 100	%	85	98	74,75	76,28	T
		Persentase aparatur pengadaan barang/jasa terlatih	Jumlah aparatur pengadaan barang/jasa terlatih dibagi jumlah aparatur pengadaan barang/jasa x 100	%	44,07	75	30,20	40,27	SR
		Persentase aparatur yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dibagi jumlah aparatur x 100	%	9,47	10	9,58	95,80	ST
		Persentase dokumen pengembangan perekonomian yang tersusun	Jumlah dokumen pengembangan perekonomian yang tersusun dibagi jumlah dokumen pengembangan perekonomian yang harus disusun x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase pengurus BUMD melalui fit and proper test	Jumlah pengurus BUMD yang dipilih melalui fit and proper test dibagi jumlah yang mendaftar x 100	%	-	-	-	-	SR
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah yang terealisasi dibagi jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah yang direncanakan x 100	%	90	90	100	111,11	ST

		Persentase ketersediaan dokumen standar harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang tersedia dibagi dokumen yang seharusnya tersusun x 100	%	100	100	100	100	ST
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya	Jumlah perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya dibagi jumlah perangkat daerah	%	100	100	100	100	ST
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Skor	74,61	82	73,27	94,06	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	Skor	83,66	77,02	84,20	109,32	ST
		Persentase kegiatan FORSESDASI yang terselenggara dengan baik	Jumlah kegiatan FORSESDASI yang terselenggara dengan baik dibagi jumlah kegiatan FORSESDASI yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	ST
		Persentase layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur dibagi jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase pelayanan umum sesuai SOP	Jumlah pelayanan umum sesuai SOP dibagi jumlah pelayanan umum x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase kegiatan APEKSI yang terselenggara dengan baik	Jumlah kegiatan APEKSI yang terselenggara dengan baik dibagi jumlah kegiatan APEKSI yang dilaksanakan x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase informasi yang terpublikasikan	Jumlah informasi yang terpublikasikan dibagi jumlah informasi yang terdata x 100	%	92,76	84	101,64	121	ST
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran dibagi rencana kebutuhan x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dibagi rencana kebutuhan x 100	%	100	100	100	100	ST
		Persentase aparatur yang terlatih di Setda	Jumlah aparatur yang terlatih dibagi jumlah aparatur di Setda x 100	%		38	45,53	119,82	ST

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

1. Isu-isu Penting terkait Bagian Pemerintahan

- a. Belum optimalnya kerjasama daerah
- b. Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain.
- c. Belum optimalnya kebijakan pembinaan terhadap kecamatan, kelurahan, RT dan RW di Kota Tanjungpinang

2. Isu-isu Penting terkait Bagian Hukum

- a. Belum optimalnya kebijakan bantuan dan keberpihakan hukum dan HAM bagi masyarakat, ASN dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan atau bagi pihak swasta yang mendorong daya saing investasi daerah.
- b. Belum optimalnya monitoring dan pelaporan produk hukum daerah

c. Belum optimalnya informasi dan dokumentasi hukum

3. Isu-isu Penting terkait Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a. Belum optimalnya perumusan kebijakan pengendalian distribusi perekonomian

b. Belum optimalnya perumusan kebijakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

c. Belum optimalnya perumusan kebijakan sumber daya alam terkait pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan

d. Belum optimalnya perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan, pembinaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil

e. Belum optimalnya perumusan kebijakan sumber daya alam terkait pertambangan dan lingkungan hidup

f. Belum Belum optimalnya perumusan kebijakan sumber daya alam terkait energy dan air

4. Isu-isu Penting terkait Bagian Organisasi

a. Belum optimalnya kebijakan teknis terkait analisis jabatan

b. Belum optimalnya kebijakan teknis pelayanan publik

c. Belum optimalnya kebijakan teknis terkait akuntabilitas dan pemberdayaan aparatur

d. Belum optimalnya tata hubungan kerja antar perangkat daerah

5. Isu-isu Penting terkait Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan

b. Belum optimalnya rumusan kebijakan bidang budaya, pendidikan dan kesehatan

c. Belum optimalnya ketersediaan data terkait keberadaan rumah ibadah, organisasi, lembaga dan ormas keagamaan.

d. Belum optimalnya inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

6. Isu-isu Penting terkait Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Belum optimalnya kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

b. Belum optimalnya kebijakan penyampaian informasi dan publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat

c. Belum optimalnya kebijakan pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- d. Belum optimalnya kebijakan pengaturan jadwal kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Permasalahan terkait Bagian Umum

- a. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- b. belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian
- c. belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah
- d. belum optimalnya penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Unit (RKPBU)
- e. belum optimalnya kebijakan penyusunan dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang-barang inventaris
- f. belum optimalnya kegiatan inventarisasi asset sekretariat daerah sesuai KIB.

8. Isu-isu Penting terkait Bagian Administrasi Pembangunan

- a. belum optimalnya penyusunan program pembangunan
- b. Belum optimalnya pengendalian program pembangunan
- c. Belum optimalnya proses monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan

9. Isu-isu Penting terkait Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- a. belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa
- b. belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pengadaan secara elektronik
- c. belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
- d. Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah
- e. Belum optimalnya kebijakan penyelenggaraan UKPBJ sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- f. Belum optimalnya personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan.

2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri 050-5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024				Hasil Kebutuhan Analisa			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						78.856.000.000				78.856.000.000	
Sekretariat Daerah						78.856.000.000				78.856.000.000	
Program Administrasi Umum						57.356.000.000				57.356.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.000.000.000				20.000.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Tanjungpinang	1356	20.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	1356	20.000.000.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					586.000.000				586.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	Tanjungpinang	2	336.000.000	APBD	Tanjungpinang	2	336.000.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	Tanjungpinang	50	250.000.000	APBD	Tanjungpinang	50	250.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.395.000.000				7.395.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	Tanjungpinang	3	300.000.000	APBD	Tanjungpinang	3	300.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	Tanjungpinang	1	150.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	150.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik	jumlah paket bahan logistik kantor ygn disediakan	paket	Tanjungpinang	9	2.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	9	2.000.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	Tanjungpinang	3	225.000.000	APBD	Tanjungpinang	3	225.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	Tanjungpinang	5	800.000.000	APBD	Tanjungpinang	5	800.000.000	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	Tanjungpinang	1	1.200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	1.200.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Tanjungpinang	1	2.500.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	2.500.000.000	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	Tanjungpinang	1	20.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	20.000.000	APBD

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.525.000.000				9.525.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	Tanjungpinang	5	3.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	5	3.000.000.000	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	Tanjungpinang	5	2.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	5	2.000.000.000	APBD
	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	unit	Tanjungpinang	35	600.000.000	APBD	Tanjungpinang	35	600.000.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	Tanjungpinang	200	1.100.000.000	APBD	Tanjungpinang	200	1.100.000.000	APBD
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit	Tanjungpinang	30	325.000.000	APBD	Tanjungpinang	30	325.000.000	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	Tanjungpinang	5	1.250.000.000	APBD	Tanjungpinang	5	1.250.000.000	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	Tanjungpinang	15	1.250.000.000	APBD	Tanjungpinang	15	1.250.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.240.000.000				6.240.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	Tanjungpinang	1	15.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	15.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	Tanjungpinang	1	2.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	2.000.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	Tanjungpinang	1	125.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	125.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	Tanjungpinang	1	4.100.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	4.100.000.000	APBD

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.700.000.000				4.700.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	Tanjungpinang	34	500.000.000	APBD	Tanjungpinang	34	500.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	Tanjungpinang	103	1.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	103	1.000.000.000	APBD
	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	unit	Tanjungpinang	1500	150.000.000	APBD	Tanjungpinang	1500	150.000.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	Tanjungpinang	623	500.000.000	APBD	Tanjungpinang	623	500.000.000	APBD
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yg dipelihara	unit	Tanjungpinang	385	650.000.000	APBD	Tanjungpinang	385	650.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Tanjungpinang	10	725.000.000	APBD	Tanjungpinang	10	725.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Tanjungpinang	4	575.000.000	APBD	Tanjungpinang	4	575.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Tanjungpinang	250	600.000.000	APBD	Tanjungpinang	250	600.000.000	APBD
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.310.000.000				2.310.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	Tanjungpinang	24	1.450.000.000	APBD	Tanjungpinang	24	1.450.000.000	APBD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	Tanjungpinang	7	180.000.000	APBD	Tanjungpinang	7	180.000.000	APBD
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	Tanjungpinang	2	80.000.000	APBD	Tanjungpinang	2	80.000.000	APBD
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	Tanjungpinang	24	600.000.000	APBD	Tanjungpinang	24	600.000.000	APBD

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					4.200.000.000				4.200.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	Tanjungpinang	1	500.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	500.000.000	APBD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	Tanjungpinang	1	450.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	450.000.000	APBD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	paket	Tanjungpinang	3	3.250.000.000	APBD	Tanjungpinang	3	3.250.000.000	APBD
	Penataan Organisasi					700.000.000				700.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	dokumen	Tanjungpinang	1	150.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	150.000.000	APBD
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	laporan	Tanjungpinang	1	350.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	350.000.000	APBD
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					1.700.000.000				1.700.000.000	
	Fasilitas Keprotokolan	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	laporan	Tanjungpinang	1	1.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	1.000.000.000	APBD
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	laporan	Tanjungpinang	1	300.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	300.000.000	APBD
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	laporan	Tanjungpinang	1	400.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	400.000.000	APBD
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						18.300.000.000				18.300.000.000	
	Administrasi Tata Pemerintahan					850.000.000				850.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	dokumen	Tanjungpinang	1	400.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	400.000.000	APBD
	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	dokumen	Tanjungpinang	1	250.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	250.000.000	APBD
	Fasilitas Kerjasama Daerah					250.000.000				250.000.000	
	Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	laporan	Tanjungpinang	1	50.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	50.000.000	APBD

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					16.000.000.000				16.000.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	dokumen	Tanjungpinang	1	10.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	10.000.000.000	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	dokumen	Tanjungpinang	1	3.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	3.000.000.000	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yg meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	dokumen	Tanjungpinang	1	3.000.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	3.000.000.000	APBD
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					1.200.000.000				1.200.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	kasus	Tanjungpinang	2	400.000.000	APBD	Tanjungpinang	2	400.000.000	APBD
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	dokumen	Tanjungpinang	1	600.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	600.000.000	APBD

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Program Perekonomian dan Pembangunan						3.200.000.000				3.200.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					650.000.000	0			650.000.000	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	Tanjungpinang	1	300.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	300.000.000	APBD
	Pengendalian Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil Pengendalian Distribusi Perekonomian	laporan	Tanjungpinang	1	350.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	350.000.000	APBD
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					650.000.000				650.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	laporan	Tanjungpinang	1	250.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	250.000.000	APBD
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	laporan	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.500.000.000				1.500.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	dokumen	Tanjungpinang	1	800.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	800.000.000	APBD
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	orang	Tanjungpinang	360	500.000.000	APBD	Tanjungpinang	360	500.000.000	APBD
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					400.000.000				400.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	dokumen	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD	Tanjungpinang	1	200.000.000	APBD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Tanjungpinang dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2023, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. RPD menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2024-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025. Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2024-2026.

Tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Tanjungpinang.
3. Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
4. Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif). Indikator pengukur keberhasilannya adalah V | 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 semakin meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Berangkat dari tujuan tersebut di atas, dirumuskan sasaran pembangunan Kota Tanjungpinang periode tahun 2024-2026. Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran dari implementasi tujuan 1, Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
3. Meningkatnya Pembangunan Gender
4. Terwujudnya Ketahanan Pangan

Sasaran dari implementasi tujuan 2, Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
2. Terkendalinya Laju Inflasi
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran
4. Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran dari implementasi tujuan 3, Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan adalah :

1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
3. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran dari implementasi tujuan 4, Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif) adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a **Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.**
- b **Meningkatnya penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis berkelanjutan**
- c **Meningkatnya hasil capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah**
- d **Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Proyeksi Tahun Berjalan	Target capaian pada tahun		
					2021	2022		2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tanjungpinang	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tanjungpinang	Nilai	69,78	69,99	70,50	76	78	81
	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	79	79,50	80	81
	Meningkatnya penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis berkelanjutan	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	41,83	41,94	44,37	45,65	47,25	48,15
	Meningkatnya hasil capaian	Nilai LPPD Kota	Nilai LPPD Kota	Nilai	NA	NA	3,25	3,35	3,35	3,40

	penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tanjungpinang	Tanjungpinang					30		
	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	45,09	47,90	50	55	60	70

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- i. Kegiatan Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 6. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian Distribusi Perekonomian
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Unsur Pendukung Usuran Pemeritahan					78.856.000.000				83.495.000.000
4	01	Sekretariat Daerah					78.856.000.000				83.495.000.000
4	01 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					57.356.000.000				59.470.000.000
4	01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.000.000.000				20.500.000.000
4	01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Tanjung pinang	1356	20.000.000.000	APBD		1356	20.500.000.000
4	01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					586.000.000				650.000.000
4	01 01 2,05 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	Tanjung pinang	2	336.000.000	APBD		2	375.000.000
4	01 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	Tanjung pinang	50	250.000.000	APBD		50	275.000.000
4	01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.395.000.000				8.025.000.000
4	01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	Tanjung pinang	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
4	01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	Tanjung pinang	3	300.000.000	APBD		3	325.000.000
4	01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	Tanjung pinang	1	150.000.000	APBD		1	175.000.000
4	01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	Tanjung pinang	9	2.000.000.000	APBD		9	2.200.000.000
4	01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	Tanjung pinang	3	225.000.000	APBD		3	250.000.000
4	01 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	Tanjung pinang	5	800.000.000	APBD		5	850.000.000
4	01 01 2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	Tanjung pinang	1	1.200.000.000	APBD		1	1.250.000.000
4	01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Tanjung pinang	1	2.500.000.000	APBD		1	2.750.000.000
4	01 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	Tanjung pinang	1	20.000.000	APBD		1	25.000.000

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 memuat hasil yang ingin dicapai selama satu tahun yang tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kerjanya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh pejabat struktural dan staf di Sekretariat Daerah.

B. SARAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Program dan kegiatan yang tersusun merupakan gambaran satu tahun kinerja Sekretariat Daerah sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana kerja ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan sehingga dapat berjalan optimal.

Tanjungpinang, 12 Juli 2023
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang

ZULHIDAYAT, S. Hut
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19781106 200502 1 004

